

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG
(*MONEY POLITIC*) DALAM PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
Di Kota Payakumbuh)**



Oleh :
Hetta Manbayu
NIM : 1121211072

Pembimbing I : Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRAK

Pemilu merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat karena adalah instrumen legal dan fundamental bagi perwujudan pengambilan keputusan politik tertinggi dalam hidup bernegara. Keberadaan pemilu yang demikian membutuhkan sistem perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang merusak integritas tujuan dari pelaksanaan pemilu, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu. Penegakan terhadap hukum pidana dalam pemilu diperlukan untuk menjaga pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga pemilu diharapkan berjalan secara demokratis dan berkeadilan serta adanya kepastian hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Salah satu pelanggaran pidana pemilu yang sangat mengkhawatirkan adalah kejahatan politik uang (*money politic*) yang hampir massif terjadi, namun sangat sukar untuk mengungkapkannya. Diantara kasus yang berhasil diungkap dan ditangani adalah kasus *money politic* di Kota Payakumbuh dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan telah dilakukan proses penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan KUHAP. Penelitian ini memfokuskan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana *money politic* yang terjadi di Kota Payakumbuh dalam kaitannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pemilu, dengan 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh menurut sistem peradilan pidana pemilu? (2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap kasus *money politic* yang dilakukan oleh Terdakwa pada kasus pelanggaran pidana pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh dalam melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat? (3) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terungkapnya kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan terkait, risalah sidang dan literatur terkait negara hukum, berita acara pemeriksaan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan yang berhubungan dengan kerangka sistem hukum pemilu dan sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana *money politic* di Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan sistem peradilan pidana pemilu dalam koordinasi Sentra Gakkumdu. *Kedua*, Terdakwa diputus bersalah oleh Hakim karena *mens rea* Terdakwa terbukti setelah mempertimbangkan *bestandeel delict* dan *element delict* Pasal 274 *juncto* Pasal 84 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; *Ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi terungkapnya kasus tersebut karena (1) adanya kesadaran hukum dan politik dari Pelapor akan akibat dari pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang merugikan hak serta kepentingan Pelapor sebagai salah satu peserta pemilu; (2) bekerjanya struktur hukum (*legal culture*) sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana pemilu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Money Politic, Kedaulatan Rakyat

ABSTRACT

Election is the realization of the sovereignty of the people because it is a legal and fundamental instrument for the manifestation of the highest political decision making in the life of the state. The existence of such elections requires a system of legal protection from all forms of violations that undermine the integrity of the objectives of the electoral exercise, in particular the enforcement of laws against election criminal offenses. Enforcement of criminal law in elections is needed to maintain the implementation of the people's sovereignty so that the election is expected to run in a democratic and fair manner and the existence of legal certainty integrated in integrated criminal justice system. One of the most alarming criminal offenses is the massively massive money politics, but it is very difficult to disclose. Among the cases that successfully diungkap and handled is the case of money politics in Payakumbuh City in the election of Members of the House of Representatives, DPD and DPRD Year 2009 And has been carried out law enforcement process based on the criminal justice system election regulated by Law Number 10 Year 2008 and KUHAP. This research focuses on law enforcement against money politic criminal violation that happened in Payakumbuh City in relation as part of election criminal justice system, with 3 (three) research questions, that is: (1) How is law enforcement on money politic case that happened in General Election of DPR, DPD and DPRD Year 2009 in Payakumbuh according to election criminal justice system? (2) How did the judge consider the guilty verdict on the money politic case committed by the Defendant in the case of the criminal violation of the election of DPR, DPD and DPRD member 2009 in Payakumbuh City in protecting the implementation of people's sovereignty? (3) What factors affect the unfolding of money politic case that happened in General Election of DPR, DPD and DPRD of 2009 in Payakumbuh City? To address these issues, this study uses legal materials such as related legislation, minutes of trial and literature related to the state of the law, investigation reports and other relevant legal materials related to the legal framework of the electoral system and the integrated criminal justice system. This study obtained the following results, Firstly, law enforcement of money politic criminal offense in Payakumbuh implemented based on the electoral criminal justice system in coordination Sentra Gakkumdu. Second, the Defendant was found guilty by the Judge because the Defendant's mens proved after considering the bestandeel delict and element delict Article 274 juncto Article 84 paragraph (1) letter j juncto Article 87 Sub-Article d of Law Number 10 Year 2008. Third, the factors that influence the disclosure of the case because (1) the legal and political awareness of the Reporter will result from the violation committed by the Defendant that harms the rights and interests of the Reporting Party as one of the election participants 2) the working of the legal structure as a sub-system of the entire electoral criminal system

Keywords: Law Enforcement, Money Politic, People's Sovereignty

